

LAPORAN KINERJA KANWIL DJKN DKI JAKARTA 2021



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014), Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta sebagai instansi pemerintah perlu menyusun LAKIN Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategia

Sesuai dengan Visi DJKN dan Visi Kanwil DJKN DKI Jakarta yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Kanwil DJKN DKI Jakarta menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan yang tertuang dalam Peta Strategis Kanwil DJKN DKI Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2021 dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta dijabarkan realisasi pencapaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2021.

Pada tahun 2021, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta mencapai 109.69%. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu Stakeholders Perspective (29%), Customer Perspective (15,68%) Internal Process Perspective (31,39%), dan Learning and Growth Perspective (33,62%).

Dengan disusunnya LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2021 ini kiranya dapat diperoleh gambaran yang jelas dan transparan tentang kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam upaya pencapaian visi dan misi DJKN. Kanwil DJKN DKI Jakarta senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.

Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta

A.Y. Dhaniarto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta	5
D. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	11
C. Pengukuran Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Inisiatif Strategis	46
C. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	50



BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta
- Sistematika Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kanwil DJKN DKI Jakarta dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta merupakan unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 163/PMK.01/2016, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- c. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan piutang negara;
- d. Pemberian bahan pertimbangan atau usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan, atau penyelesaian piutang negara;
- e. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- f. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- g. Pemberian pelayanan bantuan hukum dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengelolaan piutang negara dan lelang;
- i. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
- j. Pelaksanaan Pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengelolaan piutang negara dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengelolaan piutang negara;
- l. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

Adapun Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta terdiri dari:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik Negara di lingkungan kantor wilayah.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan di bidang kekayaan Negara.

3. Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan terhadap Penilai serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian sumber daya alam, properti, property khusus dan usaha.

4. Bidang Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang Negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang Negara, penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.

5. Bidang Lelang

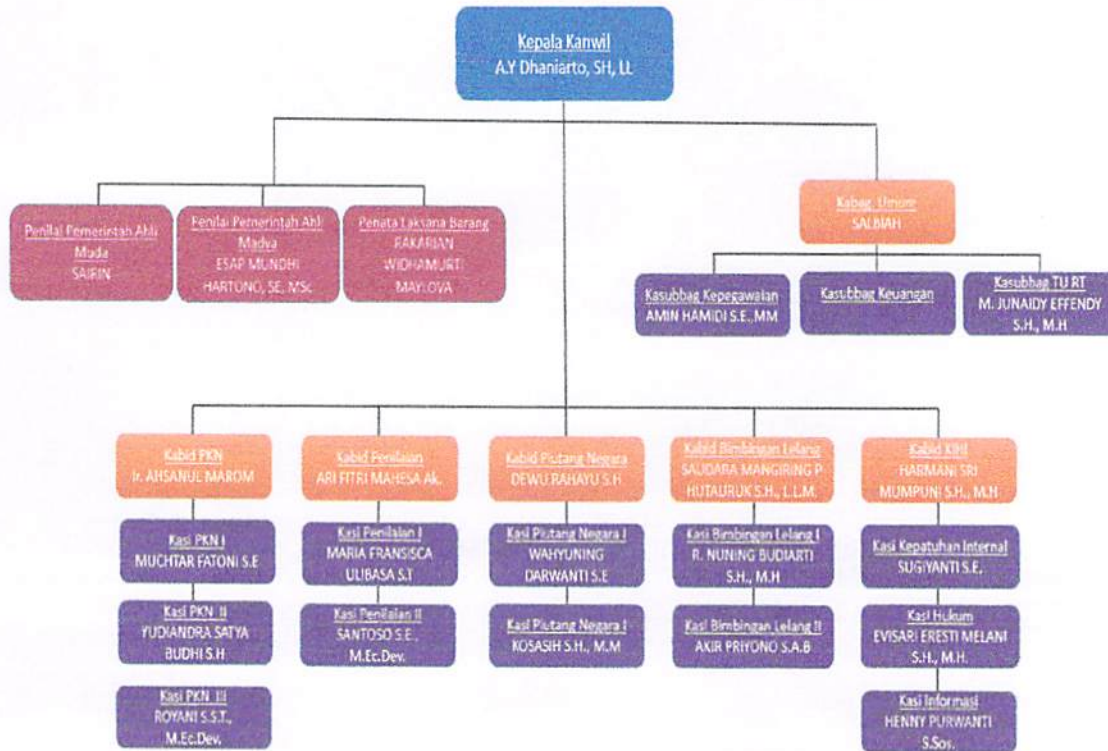
Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang, dan Jasa Lelang, serta pengawasan lelang.

6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal dan Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini:

Diagram 1.1



Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta yang merupakan instansi vertikal unit eselon II di bawah Ditjen Kekayaan Negara didukung oleh pegawai dari berbagai keahlian.

Grafik 1.
SDM Kanwil DJKN DKI Jakarta sesuai Pendidikan dan Gender

Pendidikan dan Gender	P	L	Σ
Strata 2	6	8	14
Strata 1 / Diploma IV	16	9	25
Diploma III	5	10	15
Diploma I	0	2	2
SLTA	3	3	6
SLTP	0	1	1
TOTAL	30	33	63

Grafik 2.
SDM Kanwil DJKN DKI Jakarta sesuai Usia dan Gender

Usia dan Gender	P	L	Σ
18 – 30 Tahun	1	6	7
31 – 40 Tahun	9	6	15
40 – 50 Tahun	8	16	24
> 50 Tahun	12	5	17
TOTAL	30	33	63

Grafik 3.
Rasio Jabatan dan Gender Kanwil DJKN DKI Jakarta

Rasio Jabatan dan Gender	P	L	Σ
Eselon II	0	1	1
Eselon III	4	2	6
Jafung Penilai Pemerintah	0	2	2
Jafung Pelelang	0	0	0
Jafung Penata Laksana Barang	0	1	1
Eselon IV	8	6	14
Pelaksana	20	19	39
TOTAL	32	31	63

C. Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta

Sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi DKI Jakarta yang membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan, yaitu KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II, KPKNL Jakarta III, KPKNL Jakarta IV, dan KPKNL Jakarta V. Kanwil DJKN DKI Jakarta diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani bidang pengurusan piutang negara, pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang mempunyai peran strategis sebagai berikut:

- a. Memenuhi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset Barang Milik Negara, biaya administrasi pengurusan negara dan bea lelang;

- b. Membina, mengelola, menatausahakan, dan mengamankan aset negara berupa barang jaminan;
- c. Menyajikan dan melaporkan perkembangan hasil inventarisasi dan penilaian barang milik negara;
- d. Meningkatkan citra pengurusan piutang negara dan lelang;
- e. Membina dan mengawasi kinerja aparatur di lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

Gambar 1.
Wilayah Kerja dan Pengguna Jasa Kanwil DJKN DKI Jakarta



D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Tahun 2021 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi dan peran strategis instansi Kanwil DJKN DKI Jakarta serta sistematika laporan.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, inisiatif strategis dan realisasi anggaran Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2021.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta selama Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diuraikan laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta di tahun yang akan datang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan Strategis
- Penetapan / Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Perencanaan Strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Agar tetap eksis dan konsisten serta mempunyai arah yang jelas dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pokok, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta tetap mengacu pada Visi yang telah ditetapkan yaitu :

"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Sebagai wujud penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta memiliki 5 (lima) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;

- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta merujuk pada tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode tahun 2020-2024 yaitu Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta telah menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, adalah :
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal.
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta. Strategi merupakan cara untuk

mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta yang akan ditempuh adalah :

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:
 - a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga.
 - b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
 - c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law);
 - d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas;
2. Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah :
 - a. Pelaksanaan e-Auction yang mengakomodasi prinsip-prinsip ecommerce baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan startup di bidang marketplace.
 - b. pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.
3. Strategi yang dilakukan untuk mencapai penilaian yang berkualitas adalah :
 - a. pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara.
 - b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.
4. Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah :
 - a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN.
 - b. Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi.
 - c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.
 - d. Transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan IT-Based Service Kekayaan Negara.
 - e. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan.
 - f. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.
 - g. penguatan unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
 - h. peningkatan kapabilitas dan tata kelola Kehumasan DJKN.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta melaksanakan "Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang".

Sasaran Program (*outcome*): Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal serta Mampu membangun Citra Baik bagi *stakeholder*.

Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan Indikator kinerja kegiatan yaitu: nilai kekayaan Negara yang diutilisasi, jumlah penerimaan Negara dari biaya administrasi pengurusan piutang Negara dan lelang, jumlah piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang, piutang Negara yang dapat diselesaikan dan Jumlah pokok lelang.

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Tahun 2021 dijabarkan dalam 10 Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui penetapan 20 target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Stakeholder Perspective		
1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	1a - CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
	1b - CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

	1c - CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara
Customer Perspective		
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan Pengguna Jasa	2a - N	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang
	2b - CP	Persentase realisasi pokok lelang
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	3a - CP	Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL
Internal Process Perspective		
4. Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif	4a - CP	Persentase bidang tanah yang disertifikatkan
	4b - CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset)
	4c - CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian
5. Penerapan tata kelola piutang Negara dan lelang yang efektif	5a - CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN
	5b - CP	Persentase produktivitas lelang
	5c - CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction
	5d - CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN
6. Edukasi yang Efektif	6a - N	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi
7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a - CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara
	7b - CP	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti
Learning and Growth Perspective		
8. SDM yang kompeten	8a - N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai
9. Organisasi yang Fit-for-Purpose	9a - N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM
	9b - N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja
10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a - CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Diagram 2.1. Peta Strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2021

PETA STRATEGI



Peta strategi Kantor Wilayah DJKN mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari peta strategi Kantor Wilayah DJKN Tahun 2021 tersebut terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Kode	IKU	Target Q4
	Stakeholder Perspective(25%)	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
1c-CP	Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara	100%

	Customer Perspective(15%)	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	
2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	87,30
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,69
	Internal Process Perspective (30%)	
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang efektif	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93,50
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaankekayaan negara	85%
7b-CP	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	97%
	Learning & Growth Perspective (30%)	
8	SDM yang Kompeten	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9	Organisasi yang fit for purpose	

9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM	75
9b-N	Nilai hasil revidu pengelolaan kinerja	75
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2021, Kanwil DJKN DKI Jakarta berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/MK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Inisiatif Strategis
- Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa capaian nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2021 sebesar 109,69%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN DKI Jakarta

Perspektif	2020		2021	
	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
Stakeholder	40	38,61	25	29
Customer	-	-	15	15,68
Internal Process	30	32,59	30	31,39
Learning & Growth	30	34,10	30	33,62
TOTAL NKO		105,31		109,69

Catatan Status NKO :

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi

$80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi

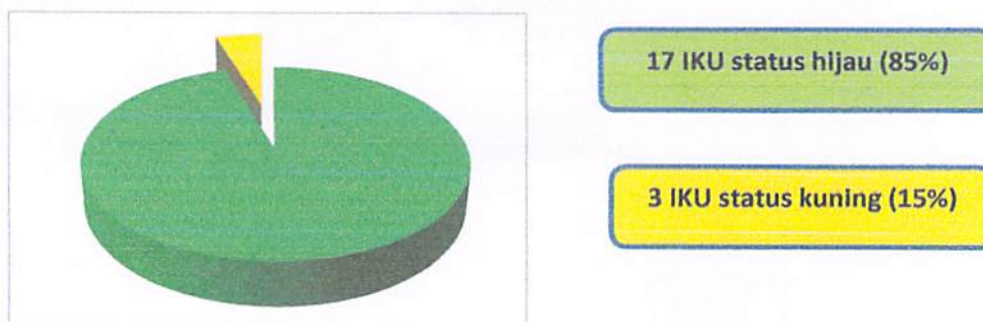
$x < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

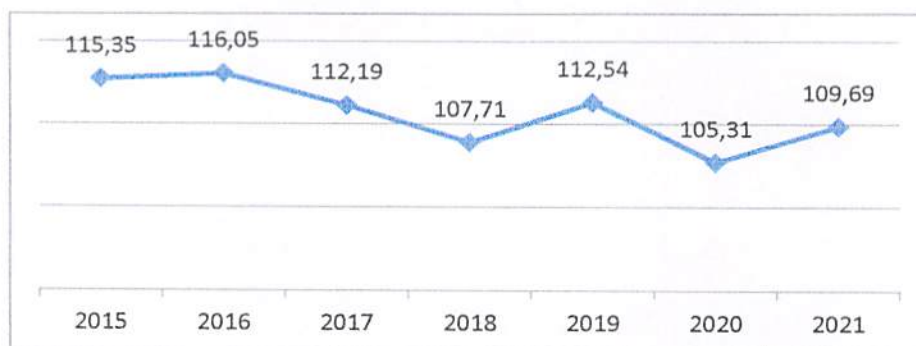
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021 Kanwil DJKN DKI Jakarta telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

instansi pemerintah. Selama tahun 2021, Kanwil DJKN DKI Jakarta memiliki 20 IKU dengan 17 IKU berstatus hijau, 3 IKU berstatus kuning. Hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2021 dapat dilihat berikut :

Grafik 3.2



Grafik 3.2
Tren Kinerja NKO Kanwil DJKN DKI Jakarta



Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)				29,00%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				116,01%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	68,83%	111,02%	hijau
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	135,97%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara	P/M	100%	118,78%	118,78%	hijau
	Customer Perspective(15%)				15,68%	

2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				108,05%	
2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	P/H	87,30	88,57	101,45%	hijau
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	113,24%	113,24%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien				101,00%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4,69	4,74	101,00%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)				31,39%	
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				102,02%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	86,67%	86,67%	kuning
4b-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	105,67%	105,67%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	4,47%	120,00%	hijau
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				110,85%	
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	P/M	100%	94,71%	94,71%	kuning
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35%	58,48%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	12,5%	0,15%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif				101,23%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	93,50	94,65	101,23%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif				104,46%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	89,95%	105,82%	hijau
7b-CP	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	97%	100,00%	103,09%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)				33,62%	
8	SDM yang Kompeten				120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose				120,00%	

9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	75	97,28	120,00%	hijau
9b-N	Nilai hasil revidi pengelolaan kinerja	P/M	75	98,70	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal				96,21%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	91,88%	96,21%	kuning
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					109,69	Hijau

Sebagaimana tertera pada tabel diatas, pada tahun 2021 Kanwil DJKN DKI Jakarta berhasil memperoleh NKO 109,69% dimana capaian dengan nilai tersebut menandakan kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta pada tahun 2021 berhasil memenuhi ekspektasi organisasi.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

1. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2. Pengurusan piutang negara; dan
3. Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

1. Seluruh BMN, KNL (Kekayaan Negara Lainnya), dan KND (Kekayaan Negara Dipisahkan) telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
2. Pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Pengelolaan kekayaan Negara yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta meliputi pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Pengelolaan Negara dikatakan optimal apabila seluruh aset

dapat diutilisasi, dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan aset Negara, dan dapat meningkatkan PNBPN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

Tabel 3.4
SS Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
I	Pengelolaan kekayaan Negara dan Lelang yang optimal			116,01%
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	68,83%	111,02%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	135,97%	120,00%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai outstanding piutang negara	100%	118,78%	118,78%

a. (1a-CP) IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

IKU ini merupakan IKU yang baru ditetapkan tahun 2020, IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN yang ada di satuan kerja dengan standar biaya dan standar kebutuhan.

Kanwil DJKN DKI Jakarta		SS: 1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						
		IKU: 1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%	Max/ TLK
Realisasi	-	75,85%	75,85%	69,13%	69,13%	68,83%	68,83%	
Capaian	-	151,70%	151,70%	125,70%	125,70%	111,02%	111,02%	

Isu Utama

IKU tercapai namun capaian NUP pada KPKNL Jakarta II tidak tercapai

Implikasi

Tingkat kesesuaian menunjukkan tren penurunan, dikhawatirkan kuantitas penyampaian form 100%, tetapi tingkat kesesuaian masih rendah

Akar Masalah

Target NUP sudah ditetapkan sehingga tidak ada pilihan

Tindakan yang telah dilaksanakan

Kanwil DJKN DKI Jakarta telah melaksanakan koordinasi mingguan secara informal dengan Kasi PKN KPKNL

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melanjutkan validasi hasil verifikasi pelaksanaan perhitungan SBSK dari KPKNL.
2. Melakukan koordinasi dengan KPKNL agar membuat rencana kerja survei penghitungan SBSK dan melaporkan satker yang sudah dan belum memenuhi target SBSK 62%.
3. Melakukan monitoring tiap bulan terhadap capaian penyelesaian perhitungan SBSK dan melakukan evaluasi terhadap hasil SBSK-nya.
4. Usulan revisi target NUP K/L untuk SBSK.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian IKU

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Target	Realisasi
2021	62%	68,83%
2020	55%	60,42%

b. (1b-CP) Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS- 1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	IKU: 1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	14,97%	44,62%	44,62%	87,79%	87,79%	135,97%	135,97%	
Capaian	149,74%	148,75%	148,75%	146,32%	146,32%	135,97%	135,97%	

Isu Utama

1. Target akan dipastikan meningkat
2. Rendahnya kualitas BKPN
3. Masih tingginya jumlah pelaksanaan lelang TAP, dikarenakan daya beli masyarakat yang belum stabil sehingga berdampak terhadap perekonomian
4. Pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung walaupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dilonggarkan oleh Pemerintah tetapi kegiatan perekonomian masih belum pulih

Implikasi

1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan debitur dan proses pengurusan Piutang Negara.
2. Rendahnya kualitas BKPN mengakibatkan BKPN tidak tertagih

3. Target akan dipastikan meningkat, sehingga potensi PNBP harus digali lebih dalam

Akar Masalah

1. Rendahnya kualitas BKPN yang diterima dari K/L karena umur piutang yang sudah lama, tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur tidak diketahui, dokumen yang tidak lengkap
2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan pembayaran oleh debitur selain itu berdampak pada proses pengurusan seperti penyampaian Surat Paksa, penilaian barang jaminan, pemeriksaan maupun penelitian lapangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan pembinaan terhadap KPKNL
2. Melakukan koordinasi dengan PNKNL mengenai bimbingan dan pembinaan di KPKNL (Rapat Bimbingan Teknis).
3. Melakukan One on One Meeting dengan KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.
4. Menerbitkan Surat Paksa
5. Melaksanakan rapat PUPN
6. Menetapkan nilai limit barang jaminan yang akan dijual lelang.
7. Melaksanakan monitoring Crash Program Keringanan Utang (CPKU)
8. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dengan PL II dan Balai Lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN DKI Jakarta
9. Penyampaian apresiasi kepada PT. Pegadaian (Persero) dengan telah tercapainya PNBP Lelang Pegadaian
10. Rapat Bimbingan Teknis dengan KPKNL Jakarta I sd. KPKNL Jakarta V mengenai Pembuatan/penyusunan serta penatausahaan risalah lelan

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melanjutkan validasi hasil verifikasi pelaksanaan perhitungan SBSK dari KPKNL.
2. Melakukan koordinasi dengan KPKNL agar membuat rencana kerja survei penghitungan SBSK dan melaporkan satker yang sudah dan belum memenuhi target SBSK 62%.
3. Melakukan monitoring tiap bulan terhadap capaian penyelesaian perhitungan SBSK dan melakukan evaluasi terhadap hasil SBSK-nya.
4. Usulan revisi target NUP K/L untuk SBSK

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Target	Realisasi
2021	100%	135,97%
2020	100%	132,65%

c. (1c-CP) IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara

Kanwil DJKN DKI Jakarta SS: 1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal IKU: 1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	26,88%	39,40%	39,40%	82,50%	82,50%	118,78%	118,78%	
Capaian	107,94%	78,80%	78,80%	110,00%	110,00%	118,78%	118,78%	

Isu Utama

1. Target Penurunan Outstanding Piutang Negara sebesar Rp2.138.822.907.471,47. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 atau sebelumnya.
2. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir

Implikasi

Penurunan kemampuan debitur dan proses pengurusan Piutang Negara

Akar Masalah

1. Rendahnya kualitas BKPN yang diterima dari K/L karena umur piutang yang sudah lama, tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur tidak diketahui, dokumen yang tidak lengkap
2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan pembayaran oleh debitur selain itu berdampak pada proses pengurusan seperti penyampaian Surat Paksa, penilaian barang jaminan, pemeriksaan maupun penelitian lapangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan pembinaan terhadap KPKNL melalui surat dan bimbingan teknis dalam pengurusan piutang Negara .
2. Melakukan usulan pencegahan terhadap Debitur .
3. Melakukan koordinasi dengan PNKNL mengenai bimbingan dan pembinaan di KPKNL (Rapat Bimbingan Teknis).

4. Pelantikan anggota PUPN dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Pemda.
5. Melakukan monitoring evaluasi dan akurasi basis data bidang Piutang Negara.
6. Melakukan monitoring Pengurusan Piutang Negara Debitur High Profile.
7. Mencetak dan memasang umbul-umbul, banner dan brosur.
8. Menyampaikan surat kepada semua satker tingkat Kanwil.
9. Melakukan One on One Meeting dengan KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.
10. Menerbitkan Surat Paksa.
11. Menetapkan nilai limit barang jaminan yang akan dijual lelang.
12. Melaksanakan monitoring Crash Program Keringanan Utang (CPKU).
13. Melaksanakan rapat PUPN

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Membuat daftar BKPN potensial dengan melakukan mapping BKPN dalam rangka mencari sumber capaian One on One Meeting dengan KPKNL.
2. Melakukan bimbingan teknis ke KPKNL terkait monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL, potensi debitur besar di KPKNL

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian IKU

Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara	Target	Realisasi
2021	100%	118,78%
2020	3%	0,52%

2. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Tabel 3.8
SS . Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			108,05%

2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	87,30	88,57	101,45%
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	113,24%	113,24%

a. 2a-N Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang

Kawil DJKN DKI Jakarta	SS: 2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	IKU: 2a-N Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	Max/ AVE
Realisasi	79,66	96,00	79,83	97,49	80,33	97,45	83,57%	
Capaian	91,25%	109,97%	91,44%	111,67%	92,02%	111,63%	101,45%	

Isu Utama

Capaian pada Bidang PKN selama tahun 2021 ada 3 produk hukum namun 1 melewati SOP, sehingga realisasinya 47,5%

Implikasi

Meskipun realisasi kanwil secara keseluruhan (rekap) tercapai, realisasi di bidang PKN merah (47,5%)

Akar Masalah

1. Pembatasan mobilisasi pegawai, sedangkan berkas diperlukan pemeriksaan secara fisik
2. Surat pemberitahuan penilaian ke Satker terlambat disampaikan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Bidang PKN terus berkoordinasi dengan Bidang KIH dan dalam hal update berkas permohonan ke tautan yang sudah disediakan oleh Bidang KIH untuk mempermudah pelaksanaan pemantauan mengingat pelaksanaan WFH dan WFO yang masih diterapkan.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Menyelesaikan layanan pengelolaan kekayaan negara sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku dan mempercepat waktu layanannya.
2. Meningkatkan fungsi monitoring penyelesaian permohonan persetujuan.
3. Mencari ide-ide baru dalam mempercepat layanan atas layanan pengelolaan kekayaan Negara

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian IKU

Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	Target	Realisasi
2021	87,30	88,57
2020	87,08	90,25

b. 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS: 2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	IKU: 2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	26,23%	54,11%	54,11%	76,60%	76,60%	113,24%	113,24%	
Capaian	131,17%	135,27%	135,27%	109,43%	109,43%	113,24%	113,24%	

Isu Utama

1. Banyaknya jumlah pelaksanaan lelang TAP, dikarenakan pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap perekonomian yang belum stabil
2. Potensi PL Kelas II berasal dari lelang kendaraan

Implikasi

Ada kebijakan tidak kena pajak untuk pembelian mobil baru, sehingga lelang mobil bekas menurun karena pembeli lebih tertarik untuk membeli mobil baru.

Akar Masalah

Apabila tahun 2021 masih terjadi pelaksanaan lelang tetapi TAP maka kemungkinan target yang telah ditetapkan oleh kantor pusat tidak akan tercapai atau sama dengan capaian tahun sebelumnya

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dengan PL II dan Balai Lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN DKI Jakarta
2. Penyampaian apresiasi kepada PT. Pegadaian (Persero) dengan telah tercapainya PNBPN Lelang Pegadaian
3. Rapat Bimbingan Teknis dengan KPKNL Jakarta I sd. KPKNL Jakarta V mengenai Pembuatan/penyusunan serta penatausahaan risalah lelang
4. Pelaksanaan Lelang pada saat ini dilakukan secara online dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat

(PPKM) untuk meminimalisir penyebaran covid 19 di wilayah DKI Jakarta

.Rekomendasi Rencana Aksi

1. Memonitor pelaksanaan lelang TAP dengan menghimbau kepada stakeholder untuk lebih mengoptimalkan pemasaran
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder
3. Melakukan Bimbingan Teknis kepada KPKNL

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi IKU Persentase Hasil Lelang

	Target		Realisasi	
	%	Rp	%	Rp
2018	100%	6.295.485.000.000	102,93	6.479.797.975.983
2019	100%	7.967.704.000.000	102,74	8.091.133.603.566
2020	100%	8.327.583.000.000	106,13	8.838.088.259.376
2021	100%	8.983.000.000.000	113,24	10.172.471.116.741

3. Sasaran Strategis : Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Tabel 3.11
SS Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			101.%
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL	4,69	4,74	101.%

3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL

Isu Utama

1. Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
2. Adanya pembatasan mobilisasi pegawai dan penugasan secara Work From Home, serta penerimaan surat yang tidak dapat berproses seperti SOP yang berjalan selama ini.

Implikasi

Jeda waktu yang terlalu jauh antara waktu pelayanan yang diterima pengguna jasa dengan pelaksanaan survei, terutama untuk pelayanan yang diterima di awal tahun

Akar Masalah

1. Pengguna jasa menuntut pelayanan tercepat
2. Pengguna jasa enggan mengisi kuesioner
3. Pengguna jasa lupa terhadap pelayanan yang pernah diterima

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Penugasan Work From Home tetap dilakukan dengan upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa (penyelesaian pekerjaan sesuai SOP).
2. Terus melakukan komunikasi dengan pihak yang mengajukan permohonan pengelolaan BMN untuk dapat melakukan tracing dokumen usulan yang diterima Satpam dan progres terakhir dari surat tersebut.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Memberikan layanan kepada stakeholder dengan berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan dan SOP layanan Pengelolaan Kekayaan Negara.
2. Meminta masukan kepada stakeholder untuk meningkatkan layanan Pengelolaan Kekayaan Negara.
3. Menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dan sinergis dengan stakeholder.

Tabel 3.12

Perbandingan IKU Kepuasan Pengguna Layanan pada Kanwil dan Kantor Pelayanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan	Target	Realisasi
2021	4,69	4,74
2020	4,66	4,71
2019	4,65	4,68
2018	4,53	4,65

4. Sasaran Strategis : Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tabel 3.13

SS Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------------	--------	-----------	---------

4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				102,02%
4a - CP	Persentase bidang tanah yang disertifikatkan	100%	86,76%	86,76%	
4b - N	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset)	100 %	105,67%	105,67%	
4c - CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22 %	4,47%	120%	

a. (4a – CP) Persentase bidang tanah yang disertifikatkan

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS: 4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	IKU: 4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target		20%	20%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi		5,56%	5,56%	10,56%	10,56%	86,67%	86,67%	
Capaian		27,78%	27,78%	17,59%	17,59%	86,67%	86,67%	

Isu Utama

1. Kantah mulai bergerak aktif diakhir-akhir tahun
2. Perpanjangan sertifikasi 2021 khusus DKI Jakarta s.d. 31 Januari 2022

Implikasi

1. Target Sertifikasi 2021 tidak tercapai
2. Aplikasi kemenkeu hanya mengakomodir realisasi s.d. 20 Januari 2022

Akar Masalah

Sertifikasi BMN Bukan menjadi prioritas utama bagi Kantor Pertanahan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan kinerja dengan seluruh seksi PKN pada KPKNL dan Koordinator Sertifikasi Kantor Pertanahan dengan salah satu pokok bahasan mengenai upaya dan strategi KPKNL dalam percepatan pencapaian target IKU pada tahun 2021, bahkan hamper ditiap minggu pada Bulan Desember
2. Monev dengan masing-masing Kantor Pertanahan dan satuan kerja pemohon telah dilaksanakan

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Berkoordinasi dengan Direktorat BMN, Kanwil BPN, KPKNL Jakarta I s/d V, Kantah se DKI Jakarta, dan Satker yang menjadi target sertifikasi tahun 2021 sehingga mempunyai langkah kerja yang sama.

2. Memastikan target sertifikasi clean dan clear, dan dapat dilengkapi persyaratannya. Apabila ada permasalahan dan hambatan segera dilakukan penggantian target untuk menjaga pencapaian target.
3. Memonitor dan mengevaluasi progres sertifikasi secara bulanan dengan kunjungan KPKNL atau Kantor pertanahan maupun melalui WA grup Sertifikasi.
4. Meminta KPKNL agar para satkernya dapat memutakhirkan data SIMANTAP

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian IKU Tahun 2021 – 2018

Persentase Bidang Tanah yang Disertifikatkan	Target	Realisasi
2021	180	156
2020	2	6
2019	44	49
2018	31	50

b. (4b – N) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset)

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS: 4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	IKU: 4b-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	16,81%	55,43%	55,43%	95,99%	95,99%	105,67%	105,67%	
Capaian	112,09%	123,17%	123,17%	127,99%	127,99%	105,67%	105,67%	

Isu Utama

Larangan aktifitas di tempat umum karena mewabahnya Virus Corona (Covid-19).

Implikasi

Kendala peninjauan ke lapangan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan monitoring progress pelaksanaan evaluasi kinerja BMN (Portofolio) melalui aplikasi SIMAN Portofolio <http://10.10.5.53:8081/simanportofolio>
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja BMN (Portofolio) dengan KPKNL

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring progress pelaksanaan evaluasi kinerja BMN (Portofolio)
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja BMN (Portofolio)

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian IKU

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset)	Target	Realisasi
2021	100%	105,67%
2020	100%	125,84%

c. (4c – CP) Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS: 4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	IKU: 4c-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	Min/ TLK
Realisasi	1,35%	1,80%	1,80%	2,39%	2,39%	4,47%	4,47%	
Capaian	193,88%	191,84%	191,84%	189,13%	189,13%	179,69%	179,69%	

Isu Utama

Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.

Implikasi

Mengikuti pola saat ini, dimana nilai yang dipakai adalah mana yang lebih tinggi antara usulan penilai pada permohonan atau nilai hasil penilaian. Permasalahan timbul apabila nilai usulan di permohonan satker lebih tinggi dari nilai hasil penilaian

Akar Masalah

Satker tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menentukan harga taksiran.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Rekapitulasi daftar kegiatan penilaian yang telah dilakukan dengan disertai nilai wajar hasil penilaian

2. Berkoordinasi secara informal dan formal melalui Nota Dinas dengan Direktorat PKNSI dan Bidang PKN Kanwil DJKN DKI Jakarta terkait nilai persetujuan pemanfaatan maupun pemindahtanganan BMN setiap bulan.
3. Penilai memperhatikan nilai usulan dalam permohonan untuk mereview hasil penilaian.

Rekomendasi Rencana Aksi

Memberikan edukasi kepada satker saat pelaksanaan survei lapangan sehingga satker memiliki pengetahuan dasar dalam mengajukan nilai taksiran

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian IKU

Deviasi ketergunaan hasil penilaian	Target	Realisasi
2021	22%	4,47%
2020	30%	3,85%

5. Sasaran Strategis : Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tabel 3.17
SS Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			110,85%
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	94,71%	94,71%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35%	58,48%	120,00%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100,00%	108,70%
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	0,15%	120,00%

a. (5a-CP) Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS: 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	IKU: 5a-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ P K
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	7,97%	43,13%	43,13%	67,24%	67,24%	94,71%	94,71%	
Capaian	31,89%	86,26%	86,26%	89,66%	89,66%	94,71%	94,71%	

Isu Utama

1. Target BKPN Selesai 7000
2. Rendahnya kualitas BKPN

Implikasi

1. Rendahnya kualitas BKPN mengakibatkan BKPN tidak tertagih
2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan debitur dan proses pengurusan Piutang Negara

Akar Masalah

1. Rendahnya kualitas BKPN yang diterima dari K/L karena umur piutang yang sudah lama, tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur tidak diketahui, dokumen yang tidak lengkap.
2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan pembayaran oleh debitur selain itu berdampak pada proses pengurusan seperti penyampaian Surat Paksa, penilaian barang jaminan, pemeriksaan maupun penelitian lapangan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan pembinaan terhadap KPKNL melalui surat dan bimbingan teknis dalam pengurusan piutang Negara
2. Melakukan koordinasi dengan PNKNL mengenai bimbingan dan pembinaan di KPKNL (Rapat Bimbingan Teknis).
3. Melakukan One on One Meeting dengan KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Membuat daftar BKPN potensial dengan melakukan mapping BKPN dalam rangka mencari sumber capaian.
2. One on One Meeting dengan KPKNL
3. Melakukan bimbingan teknis ke KPKNL terkait monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL, potensi debitur besar di KPKNL

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian IKU

Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	Target	Realisasi
2021	100%	94,71%
2020	100 %	80,70%

b. (5b-CP) Persentase produktivitas lelang

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS: 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	IKU: 5b-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%	Max/ TLK
Realisasi	54,21%	54,59%	54,59%	57,01%	57,01%	58,48%	58,48%	
Capaian	361,41%	272,94%	272,94%	228,05%	228,05%	167,08%	167,08%	

Isu Utama

Masih terdapat pelaksanaan lelang yang TAP (Tidak Ada Penawaran) dan dibatalkan oleh pemohon

Implikasi

Kurang maksimalnya capaian produktivitas lelang

Akar Masalah

Dalam pelaksanaan lelang Eksekusi UUHT Pasal 6, Kreditur mengajukan permohonan lelang sebagai salah satu strategi agar debitur segera melakukan pembayaran/pelunasan terhadap objek lelang

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Imbauan kepada stakeholder untuk mengupayakan objek lelang yang diusulkan telah free & clear.
2. Menghimbau kepada stakeholder untuk lebih optimal dalam pemasaran dan/atau menemukan peminat yang potensial sehingga objek lelang yang ditawarkan agar lelang yang dilaksanakan optimal.

Rekomendasi Rencana Aksi

Menyampaikan kepada KPKNL/PL2 untuk menghimbau pada Stakeholder agar lelang yang diusulkan free & clear, dan melakukan upaya pemasaran sebelum diusulkan lelang

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian IKU

Persentase produktivitas lelang	Target	Realisasi
2021	35%	58,48%
2020	34%	39,48%

c. (5c-CP) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS: 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	IKU: 5c-N Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	

Isu Utama

Semua pelaksanaan lelang telah dilaksanakan secara e-auction dan e-conventional auction

Implikasi

Sampai dengan triwulan IV capaian IKU maksimal yaitu 100%

Tindakan yang telah dilaksanakan

Menghimbau kepada stakeholder yang masih melaksanakan lelang konvensional untuk segera beralih ke lelang e-auction dan e-konvensional auction

Rekomendasi Rencana Aksi

Menghimbau kepada KPKNL untuk mewajibkan pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian IKU

Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	Target	Realisasi
2021	92%	100%
2020	100%	102,74%

d. (5d-CP) Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS: 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	IKU: 5d-N Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	Max/ TLK
Realisasi	2,51%	1,16%	1,16%	0,46%	0,46%	0,15%	0,15%	
Capaian	179,91%	190,71%	190,71%	196,31%	196,31%	198,77%	198,77%	

Isu Utama

1. Perbedaan data pada aplikasi SPAN dan Simponi
2. Sinkronisasi aplikasi SPAN dan Simponi yang membutuhkan waktu
3. Dibutuhkannya waktu yang tidak singkat untuk melakukan rekonsiliasi PNBPN terlebih dahulu

Implikasi

Pada saat waktu pelaporan kinerja petugas harus selalu mengecek OMSPAN apabila ada update data

Akar Masalah

Aplikasi SPAN dan Simponi yang masih memerlukan pemutakhiran lebih lanjut sehingga menyebabkan proses sinkronisasi aplikasi SPAN dan Simponi mengalami trouble atau mengalami perbedaan data dalam beberapa waktu.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Telah menyampaikan hasil rekonsiliasi PNBPN s.d. Bulan Desember 2021 pada aplikasi SPAN dan Simponi sebagai monitoring sinkronisasi data PNBPN antara aplikasi SPAN dan Simponi.

Rekomendasi Rencana Aksi

Agar pihak pengembang aplikasi dapat mengembangkan aplikasi Simponi menjadi update secara real time jika ada perbaikan rekonsiliasi PNBPN sehingga aplikasi Simponi dan SPAN dapat tersinkronisasi dengan baik

6. Sasaran Strategis : Edukasi yang Efektif

Tabel 3.21
SS Edukasi yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6	Edukasi yang Efektif			101,23%
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93,50	94,65	101,23%

6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Kawwil DJKN DKI Jakarta	SS: 6. Edukasi yang efektif							
	IKU: 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target		93,5	93,5		93,5	93,5	93,5	Max/ Ave
Realisasi		96,63	96,63		96,63	95,67	94,65	
Capaian		100,14%	100,14%		100,14%	102,21%	101,23%	

Isu Utama

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi adalah gabungan dari edukasi kanwil ke pengguna jasa dan bimbingan teknis kanwil ke KPKNL, targetnya 93,5

Implikasi

Bimbingan ke KPKNL dan layanan kepada pengguna layanan harus ditingkatkan

Akar Masalah

1. Pengguna jasa enggan mengisi kuesioner
2. Bidang lelang tidak melaksanakan edukasi kepada pengguna layanan

Tindakan yang telah dilaksanakan

Pembinaan rutin ke KPKNL dan pengguna layanan baik melalui surat maupun virtual

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan edukasi kepada pemangku kepentingan baik melalui surat, media sosial maupun workshop tertentu.
2. Melakukan bimbingan teknis baik melalui surat, workshop ataupun sosialisasi atau meeting/rapat lainnya dalam pengelolaan kekayaan negara kepada KPKNL.
3. Meminta masukan kepada KPKNL atas edukasi maupun komunikasi yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kinerja KPKNL

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian IKU

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Target	Realisasi
2021	93,5	94,65
2020	93	94,22

7. Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Tabel 3.23
SS Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			104,46%
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	89,95%	105,82%

7b-CP	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	97%	100,00%	103,09%
-------	--	-----	---------	---------

a. (7a-CP) Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS: 7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif							
	IKU: 7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target		40%	40%		40%	85%	85%	Max/ TLK
Realisasi		51,27%	51,27%		51,27%	89,95%	89,95%	
Capaian		128,17%	128,17%		128,17%	105,82%	105,82%	

Isu Utama

1. Target tindak lanjut pengelolaan aset tahun 2021 adalah sebesar 85%
2. Terhadap persetujuan yang telah diterbitkan, Satuan Kerja telah melakukan tindak lanjut persetujuan namun belum melakukan input persetujuan dan progres ke dalam aplikasi SIMAN

Implikasi

Pelaksanaan tindak lanjut oleh Satuan Kerja tidak terpantau

Akar Masalah

1. Aplikasi SIMAN belum update
2. Jumlah Satker yang cukup banyak di wilayah kerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dan setiap Satker memiliki karakteristik pengelolaan BMN yang berbeda
3. Kesadaran Satker yang kurang dalam menindaklanjuti surat persetujuan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Kanwil DJKN DKI Jakarta telah berkoordinasi dan memintakan secara langsung baik melalui surat maupun secara informal kepada Satuan Kerja untuk dapat menyampaikan laporan.
2. Terhadap persetujuan pengelolaan yang belum diinput dalam aplikasi SIMAN, Kanwil telah melakukan hal tersebut dengan bantuan rekan-rekan yang melaksanakan On Job Training

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang telah diterbitkan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta.
2. Melakukan koordinasi dengan satker atas tindak lanjut surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta
3. Memonitor aplikasi SIMAN secara berkala untuk memastikan surat persetujuan pengelolaan BMN telah tuntas ditindaklanjuti. Apabila belum selesai ditindaklanjuti, diberikan surat peringatan.
4. Mengevaluasi persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset.

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian IKU

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	Target	Realisasi
2021	85%	89,95%
2020	80%	84,13%

b. (7b-CP) Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS: 7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif							
	IKU: 7b-N Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target						97%	97%	Max/ TLK
Realisasi						100%	100%	
Capaian						103,09%	103,09%	

Isu Utama

Target tahun 2021 berasal dari KPKNL Jakarta I dan KPKNL Jakarta II

Implikasi

Tindak lanjut atas rekomendasi harus terus dipantau dan dievaluasi melalui aplikasi teamcentral mengingat target ada di unit KPKNL

Akar Masalah

Aplikasi TeamCentral yang tidak user friendly

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi temuan secara rutin melalui aplikasi teamcentral
2. Berkoordinasi dengan Itjen, KPKNL Jakarta I, dan KPKNL Jakarta II

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Membuat jadwal penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi Pengawasan
2. Melakukan monitoring progres penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Tabel 3.25
Perbandingan Capaian IKU

Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	Target	Realisasi
2021	97%	100,00%
2020	90%	100%

8. Sasaran Strategis : SDM yang Kompeten

Tabel 3.26
SS SDM yang Kompeten

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
8	SDM yang Kompeten			120%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%

(8a – N) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS: 8. SDM yang kompeten							
	IKU: 8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	5m.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	28,89%	66,67%	66,67%	108,46%	108,46%	120,00%	120,00%	
Capaian	192,59%	166,67%	166,67%	144,62%	144,62%	120,00%	120,00%	

Isu Utama

1. Untuk Tahun 2021 evaluasi pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai dilakukan untuk pegawai dengan Jabatan Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pelaksana
2. Capaian terdiri dari Capaian Utama dan Capaian Tambahan. Capaian Utama merupakan terdiri dari pegawai (Pejabat Pengawas dan Pelaksana yang telah memenuhi kriteria 24 Jamlat, pelatihan sesuai tusi dan memenuhi usulan DKI (usulan training di DKI pada

aplikasi e-performance) dengan pembobotan 100%, sedangkan capaian tambahan adalah merupakan jumlah pegawai yang melebihi 24 Jamlat dan memenuhi usulan DKI (usulan training) dengan pembobotan 20%.

Implikasi

Sampai dengan bulan Desember 2021 52 pegawai telah mengikuti pelatihan melebihi 24 Jamlat dan memenuhi usulan DKI (usulan training) dari jumlah target pegawai sebanyak 52 orang

Akar Masalah

1. Beban kerja yang cukup tinggi serta adanya Work From Home (WFH) menyebabkan beberapa pegawai kesulitan untuk mengikuti e-learning yang telah dijadwalkan.
2. Masih ada beberapa usulan pelatihan yang telah disampaikan ke Kantor Pusat DJKN, namun belum disetujui walaupun pelatihan dimaksud dilakukan dengan metode e-learning.
3. Masih ada beberapa pegawai yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi tetapi belum melaporkan melalui bit.ly/DJKNKJpantaw

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan himbauan kepada para pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ditawarkan, dalam hal ini e-learning yang diselenggarakan oleh DJKN bekerja sama dengan BPPK ataupun Lembaga yang lain.
2. Melakukan Monitoring terhadap pelatihan (e-learning) yang telah dijadwalkan serta mendorong pegawai mengikuti e-learning dimaksud sesuai jadwalnya maupun pegawai yang belum mengikutinya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan bimbingan dan pemberian motivasi kepada para pegawai untuk tetap mengikuti pelatihan-pelatihan yang ditawarkan dan dijadwalkan walaupun tidak sesuai dengan tusinya.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat untuk memberikan kesempatan kepada para pegawai yang berminat mengikuti pelatihan.

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian IKU

Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Target	Realisasi
2021	100%	120%
2020	100%	120%

9. Sasaran Strategis : Organisasi yang Fit for Purpose

Tabel 3.28
SS Organisasi yang Fit for Purpose

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
9	Organisasi yang fit for purpose			120%
9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM	75	97,28	120%
9b-N	Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja	75	98,70	120%

a. (9a-N) Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM

Kamwil DJKN DKI Jakarta	SS: 9. Organisasi yang fit for purpose							
	IKU: 9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target						75	75	Max/ TLK
Realisasi						97.28	97.28	
Capaian						129.71%	129.71%	

Isu Utama

Pembangunan ZI WBK melibatkan seluruh pegawai Kanwil DJKN DKI Jakarta baik ASN maupun Non ASN

Implikasi

Seluruh pegawai kanwil DJKN DKI Jakarta terlibat dalam seluruh kegiatan dan bertanggung jawab atas pembangunan ZI WBK

Akar Masalah

Aplikasi survei dari Kemenpan RB yang sempat mengalami masalah saat proses survei ke responden sedang dilaksanakan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pembangunan WBK
2. Menjalin intimitas dengan responden

Rekomendasi Rencana Aksi

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama pembangunan ZI WBK tahun 2021 harus terus dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik

b. (9b-N) Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja

Kanwil DJKN DKI Jakarta								
SS: 9. Organisasi yang fit for purpose								
IKU: 9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target						75	75	Max/ TLK
Realisasi						98,7	98,7	
Capaian						131,60%	131,60%	

Isu Utama

Reviu Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan kontrak kinerja, edukasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi

Implikasi

Semua pelaksanaan pengelolaan kinerja di Kanwil DJKN DKI Jakarta harus di dokumentasikan dengan baik

Akar Masalah

Kesadaran yang kurang dari pegawai untuk mengelola kinerja dengan baik karen pencapaian IKU ini memerlukan koordinasi dan kerjasama dari semua pegawai

Tindakan yang telah dilaksanakan

Dokumentasi dilaksanakan secara lengkap dan di file tersendiri

Rekomendasi Rencana Aksi

Dokumen pengelolaan Kinerja tahun 2021 harus semuanya dibuat dan disampaikan tepat waktu

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian IKU

Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja	Target	Realisasi
2021	75	87
2020	70	97,9

10. Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Tabel 3.30
SS Pengelolaan Keuangan yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			96,21%
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	91,88%	96,21%

(10a – CP) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Kanwil DJKN DKI Jakarta	SS: 10. Pengelolaan keuangan yang optimal							
	IKU: 10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/ TLK
Realisasi	99,31%	79,10%	79,10%	82,62%	82,62%	91,88%	91,88%	
Capaian	103,99%	82,83%	82,83%	86,51%	86,51%	96,21%	96,21%	

Isu Utama

1. Keterlambatan Penyelesaian Tagihan SPM
2. Keterlambatan Pertanggungjawaban UP dan TUP
3. Penyerapan Anggaran pada Kanwil DJKN DKI Jakarta yang belum optimal

Implikasi

Capaian s.d. Triwulan IV kuning

Akar Masalah

1. Keterlambatan Penyelesaian Tagihan SPM.
2. Keterlambatan Pertanggungjawaban UP dan TUP
3. Wabah Covid-19 yang menyebabkan terganggunya operasional Penyerapan anggaran menjadi kurang optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah dilakukan penyampaian nota dinas ke bidang-bidang terkait identifikasi optimalisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Juni 2021.
2. Telah dilakukan penyampaian nota dinas ke bidang-bidang terkait anggaran yang kemungkinan tidak terpakai dan digunakan untuk refocusing anggaran.

3. Telah dilakukan Revisi kewenangan DJA terkait Pergeseran Dana tidak terpakai pada Bidang Teknis ke Umum untuk dapat direalisasikan.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan pergeseran anggaran melalui mekanisme kewenangan KPA atau Kanwil DJPb atau DJA

Tabel 3.31
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Target	Realisasi
2021	95,5%	91,88%
2020	95%	95,97%
2019	95%	96,12%
2018	95%	98,51%

B. Inisiatif Strategis

Pada tahun 2021 Kanwil DJKN DKI Jakarta menetapkan 1 (satu) Inisiatif Strategis (IS) yaitu :

IKU : Pengelolaan kekayaan negara yang optimal/ Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

IS : Optimalisasi BMN (KOIN)

Obyek Optimalisasi :

1. Aset Properti Eks BPPN yang berlokasi di Tomang Barat Blok P Kaveling Nomor 460, Jl. Menteng, RT. 011/07, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

- a. Rencana Proyek Optimalisasi

Optimalisasi Aset Properti Eks BPPN sebagai lahan parkir dan sarana olahraga

- b. Progres Kegiatan

Tim telah melaksanakan cek fisik aset di lapangan untuk mengetahui kondisi aset terkini dan kondisi sekitar aset tersebut. Selain itu, tim juga berkoordinasi dengan pemohon pemanfaatan aset untuk mengetahui detail peruntukan pemanfaatan aset.

Dalam kesempatan berikutnya, bersamaan dengan pelaksanaan pembuatan video dokumentasi tim koin, keluarga pemohon pemanfaatan aset saat dihubungi oleh tim, menyatakan bahwa belum dapat melanjutkan permohonan pemanfaatan dimaksud. Tim Koin telah berkomunikasi dengan Ketua RW setempat, namun demikian dari pihak RW belum dapat menindaklanjuti lebih lanjut karena masa jabatan Ketua RW akan segera berakhir

c. Kendala/Akar Masalah

Pemohon pemanfaatan aset telah meninggal dunia. Keluarga pemohon saat dihubungi oleh tim, menyatakan bahwa belum dapat melanjutkan permohonan pemanfaatan dimaksud.

d. Output

Data Aset Properti Eks BPPN yang potensial untuk dimanfaatkan

2. Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berupa peralatan dan mesin Mobile Laboratorium Biosafety Level-2 (MBSL-2).

a. Rencana Proyek Optimalisasi

Optimalisasi BMN untuk Pencegahan COVID-19 (Komersialisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)).

b. Progres Kegiatan

Tim Koin telah melakukan kegiatan cek fisik BMN serta peninjauan lapangan bersamaan dengan kegiatan penilaian BMN yang dilakukan oleh tim penilai KPKNL Jakarta II serta berkoordinasi dengan pihak BPPT perihal pemanfaatan BMN dimaksud.

Dalam proses penilaian, ditemukan masih terdapat kekurangan dokumen yang perlu dilengkapi. Adapun kekurangan dokumen tersebut terkait dengan status BMN yang masih tercatat pada subsatker walaupun secara fisik BMN telah diserahkan ke satker pusat, sehingga perlu dilakukan transfer pencatatan BMN ke satker pusat dalam hal ini BPPT. Terkait dengan hal tersebut, tim telah berkoordinasi dengan BPPT namun demikian proses transfer belum dapat diselesaikan pada tahun ini

c. Kendala/Akar Masalah

Saat ini pencatatan dan penatausahaan BMN Objek KOIN masih berada pada Satker Teknis yang membangun dan mengembangkan MBSL-2

dimaksud. Disamping itu, pembiayaan pembangunan dan pengembangan asset juga bersumber dari DIPA beberapa satker, sehingga saat ini masih dalam proses penyatuan pencatatan yang nantinya akan dicatat pada Biro Umum BPPT sebagai pengusul pemanfaatan asset..

d. Output

Pemanfaatan MBSL-2 yang nantinya akan menghasilkan PNPB dan manfaat sosial yang mendorong penanganan dan penekanan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau

C. Realisasi Anggaran

DIPA Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.7.277.657.000,- dan realisasi DIPA untuk semua jenis belanja sebesar Rp7.158.290.260,- sehingga saldo Rp.119.366.640,-

Adapun rincian realisasi DIPA Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

	PAGU	REALISASI	SALDO
Sosialisai PKN	3.060.000	2.960.000	100.000
Realisasi PKN ALIASE	900.000	900.000	0
Monev Sertifikasi	240.000	240.000	0
Kepuasan Pemohonan PKN	45.434.000	35.714.342	9.719.658
Kepuasan Penerimaan PKN	28.783.000	23.442.300	5.340.700
Revisi/Idak/Amal/ke Disdik/Keptan	155.396.000	147.354.000	8.042.000
Revisi/Idak/Amal/ke BKKD/Keperikanan	5.276.000	5.090.475	185.525

	PAGU	REALISASI	SALDO
Rekomendasi Hasil Penilaian	10.570.000	6.600.000	3.970.000
Pengelolaan PKN ALIASE	9.600.000	9.600.000	0
Pengelolaan Aset BUN	301.100.000	342.580.536	38.511.464
Unit Bata Merah/PL Kelas II	22.000	0	22.000
Operasi Hukum	17.340.000	16.326.000	1.014.000
Operasionalisasi Kantor	4.171.071.000	4.120.329.385	40.741.615
Kerumahaan	101.264.000	96.179.844	5.084.156

REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT			
Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 Berdasarkan Aplikasi Saku			
	PAGU	REALISASI	SALDO
Kelembagaan Peradilan dan JKN	905.796.000	898.797.483	3.064.535
Kelembagaan Lahan dan Perumahan	116.144.000	115.727.356	422.644
Kelembagaan Gedung dan Bangunan	1.324.105.000	1.323.878.457	226.543
Kelembagaan	1.660.000	1.660.000	0
Kelembagaan Kebutuhan Internal	22.000	0	22.000

Sementara realisasi output dari DIPA Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

REALISASI RINCIAN OUTPUT				
Sampai dengan Bulan DESEMBER Tahun 2021				
	TARGET	REALISASI	STATUS	TARGET 2022
Sosialisasi PKN	2 kegiatan	5 kegiatan	TERCAPAI	25 Orang
Sosialisasi PN & Lelang	2 kegiatan	22 kegiatan	TERCAPAI	40 Orang
Money Service	1 rekomendasi	6 rekomendasi	TERCAPAI	1 rekomendasi
Revisi Perumahan PKN	25 surat	31 surat	TERCAPAI	15 surat
Revisi Perumahan PKN	4.903 BKRPN	6.602 BKRPN	TERCAPAI	3.783 BKRPN
Revisi Perumahan PKN	100 rekomendasi	130 rekomendasi	78,07%	370 rekomendasi
Revisi Perumahan PKN	1 rekomendasi	2 rekomendasi	TERCAPAI	1 rekomendasi

REALISASI RINCIAN OUTPUT				
Sampai dengan Bulan DESEMBER Tahun 2021				
	TARGET	REALISASI	STATUS	TARGET 2022
Revisi Perumahan PKN	1 DKPB	3 DKPB	TERCAPAI	1 DKPB
Revisi Perumahan PKN	110 rekomendasi	130 rekomendasi	TERCAPAI	4 rekomendasi
Revisi Perumahan PKN	31 Aset	164 Aset	TERCAPAI	150 Aset
Revisi Perumahan PKN	4 rekomendasi	4 rekomendasi	TERCAPAI	110 rekomendasi
Revisi Perumahan PKN	7 Perkara	8 Perkara	TERCAPAI	7 Perkara
Revisi Perumahan PKN	12 bulan	12 bulan	TERCAPAI	12 bulan
Revisi Perumahan PKN	12 bulan	12 bulan	TERCAPAI	12 bulan

REALISASI RINCIAN OUTPUT

Sampai dengan Bulan DESEMBER Tahun 2021

17

	PAGU	REALISASI	STATUS	TARGET 2022
Pemeliharaan Perbaikan dan Slesin	12 bulan	12 bulan	TERCAPAI	12 bulan
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12 bulan	12 bulan	TERCAPAI	12 bulan
fasilitas Perlatan Perawatan	12 unit	12 unit	TERCAPAI	-
Publikasi	1 kegiatan	17 kegiatan	TERCAPAI	250 Orang
Rekrutasi dan Kapasitas Internal	5 laporan	5 laporan	TERCAPAI	5 laporan



BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2021 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kanwil DJKN DKI Jakarta serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta pada tahun 2021 secara umum dapat dikatakan berhasil/baik. Secara umum kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2021 yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) dan sejalan dengan program anggaran berbasis kinerja mencapai 109,69% (memenuhi ekspektasi).
- b. Dari 20 IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2021, sebanyak 17 IKU dapat tercapai semua target yang telah ditetapkan. 3 IKU dengan realisasi antara 80 s.d 99% dari target.

Dalam rangka mengamankan sasaran dan tujuan diperlukan strategi pemecahan masalah untuk menghadapi berbagai kendala yang ada, strategi yang akan diterapkan oleh Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pelayanan dan melakukan sosialisasi yang terus menerus terhadap *stakeholder* dan *customer*.
- b. Meningkatkan kompetensi para pegawai pada bidang-bidang teknis (bidang pengelolaan kekayaan negara dan bidang penilaian) dalam rangka pencapaian target Revaluasi BMN dan penilaian asset melalui diklat teknis maupun diklat penyegaran (*capacity building*).
- c. Bersama-sama dengan KPKNL melakukan penggalan potensi ke satker K/L untuk lebih meningkatkan optimalisasi aset.

- d. Meningkatkan capaian target pendapatan negara melalui lelang dan piutang Negara lebih sering dilakukan.
- e. Melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada satker-satker di wilayah kerja.

Semua yang dicapai saat ini merupakan hasil kerjasama antara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta dengan KPKNL Jakarta I sampai V yang berada di wilayah kerjanya, dimana hal ini harus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak ada komitmen dan konsistensi yang telah direncanakan bersama. Untuk itu agar selalu berkomitmen dan konsisten maka dibutuhkan kerjasama dan kebersamaan seluruh aparat/jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan baik kepada instansi vertikal di atasnya maupun pada jajaran aparat di lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Pada akhirnya diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil langkah atau kebijakan untuk perbaikan menuju tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Formulir Pengukuran Kinerja Unit Eselon II Tahun 2021

Unit Organisasi Kanwil DJKN DKI Jakarta
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	68,83%	111,02%
		Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	135,97%	120,00%
		Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara	100%	118,78%	118,78%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	87,30	88,57	101,45%
		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	113,24%	113,24%
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL	4,69	4,74	101,00%
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	86,67%	86,67%
		Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	105,67%	105,67%
		Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	4,47%	120,00%
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	94,71%	94,71%
		Persentase produktivitas lelang	35%	58,48%	120,00%
		Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100,00%	108,70%
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%	0,15%	120,00%
6	Edukasi yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93,50	94,65	101,23%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaankekayaan negara	85%	89,95%	105,82%
		Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	97%	100,00%	103,09%
8	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
9	Organisasi yang fit for purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM	75	97,28	120,00%
		Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja	75	98,70	120,00%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	91,88%	96,21%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2021 : Rp.7.277.657.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2021 : Rp.7.158.290.360